

## Kinerja Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Kantor Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Muhammad Fernanda Samlin Tamawa Putra<sup>1</sup>, Deby Febriyan Eprilianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: <sup>1</sup>m.19083@mhs.unesa.ac.id, <sup>2</sup>debyepriyanto@unesa.ac.id

### Abstract

*The implementation of financial administration in the Winongan Lor Village Office is carried out by the Village Secretary with the Head of Financial Affairs (Kaur Keuangan) along with 1 (one) Kaur Keuangan staff. However, there are still problems with the performance of village officials in implementing village financial administration, namely that village officials do not complete financial reports on time and the results of financial reports reported to the public exceed the specified deadline. Therefore, this study aims to determine and describe the performance of village officials in implementing financial administration in the Winongan Lor Village Office. This study uses descriptive qualitative research. This study focuses on employee performance indicators from Mitchell which include work quality, initiative, punctuality, ability, and communication. The data sources for this study use primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use narrative analysis techniques. The results of this study indicate that the work quality indicator has produced good work quality, the initiative indicator has been initiated well. The timeliness indicator has not been carried out properly because there are still delays in the budgeting and financial reporting processes. The ability indicator has shown good ability. The communication indicator has been carried out well.*

**Keywords:** Performance, Village Apparatus, Village Financial Administration.

### Abstrak

Pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) beserta 1 (satu) staff Kaur Keuangan. Namun masih terdapat permasalahan dari kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan desa yaitu perangkat desa tidak menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan hasil Laporan keuangan yang dilaporkan ke masyarakat melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada indikator kinerja pegawai dari Mitchell yang meliputi kualitas kerja, inisiatif, ketepatan waktu, kemampuan, dan komunikasi. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis naratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator kualitas kerja sudah menghasilkan kualitas kerja yang baik, Indikator inisiatif sudah diinisiasi dengan baik. Indikator ketepatan waktu belum dilakukan dengan baik karena masih terdapat keterlambatan proses penganggaran dan pelaporan keuangan. Indikator kemampuan sudah menunjukkan kemampuan yang baik. Indikator komunikasi sudah dilakukan dengan dengan baik.

**Kata Kunci:** Kinerja, Perangkat Desa, Administrasi Keuangan Desa.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memaksimalkan peran desa dalam menyelenggarakan otonomi desa. Pemerintah desa mengatur bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik pada masyarakatnya guna mencapai kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan [1]. Selain memiliki fungsi sebagai agen pembangunan, pemerintah desa juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa. Pemerintah desa sebagai promotor bagi jalannya pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa memimpin pemerintahan desa yang didukung oleh perangkat desa yang bekerja untuk pemerintah desa sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan desa. Perangkat desa membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa yaitu melaksanakan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kontribusi nyata perangkat desa diwujudkan dengan mempertahankan sikap etos kerja yang profesional dan loyalitas kerja yang tinggi [2]. Maka dari itu kinerja perangkat desa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Fachreza (dalam Anggraini & Eprilianto, 2022) kinerja tertuju pada hasil kerja yang dilakukan suatu organisasi dengan mempekerjakan pegawai sesuai dengan tuntutan dan kewajiban tertentu dalam rangka menciptakan tujuan organisasi. Kinerja mencakup kinerja individu maupun kinerja kelompok. Hasil kinerja tidak hanya berlaku pada anggota yang menempati jabatan fungsional atau struktural saja, tetapi juga pada seluruh jenjang anggota dalam organisasi. Kinerja dihasilkan dari suatu pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya [3]. Kinerja dapat diidentifikasi dan dinilai ketika seorang pegawai memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan oleh instansi. Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas, posisi, atau peran dalam suatu organisasi dengan rasa akuntabilitas, komitmen, dan loyalitas yang tinggi. Kualitas kinerja merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah tujuan organisasi telah tercapai. Sumber daya manusia yang ada dalam organisasi mempunyai fungsi yang krusial untuk menyalurkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas kinerjanya [4]. Kinerja perangkat desa diartikan berupa bentuk kegiatan dari perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat baik pelayanan administrasi maupun non administrasi sebagai bagian dari bentuk pelayanan yang tersedia di dalam lingkup desa. Oleh karena itu, jalannya pemerintahan desa ditentukan oleh bagaimana perangkat desa dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Untuk menciptakan kinerja yang baik, perangkat desa harus memiliki kemampuan komunikasi dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas yang menjadi penunjang dalam memudahkan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya [5].

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah desa mampu menjalankan pembangunan desa secara berkelanjutan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing desa berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengurus tata kelola pemerintahannya secara mandiri termasuk kekuasaan dalam mengelola dan mengatur keuangannya secara mandiri dari dana desa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan desa dan pembangunan desa. Dana desa mencakup dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa untuk disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk menopang jalannya pemerintahan desa, menjalankan pembangunan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa disusun atas dasar prinsip transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan secara teratur, efektif dan efisien. Selain itu, pengalokasian dana desa juga dilakukan dengan berbagai tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Tahap-tahap itulah yang menjadi standar dan penilaian terhadap keberhasilan dan efisiensi pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan tanggung jawab dana desa merupakan rangkaian pengelolaan keuangan desa." Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa diatur dalam beberapa tahap dimulai dari tahap perencanaan, tahap pengelolaan, hingga tahap pelaporannya dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Administrasi keuangan desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang disusun dalam buku administrasi keuangan. Dana desa diartikan sebagai suatu kepemilikan desa yang diberikan berupa nominal dalam bentuk uang serta segala sumber daya yang menjadi milik desa yang dikelola untuk pembangunan desa secara berkelanjutan [6]. Sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, keuangan dan sumber daya yang ada di desa harus dikelola secara efektif dan efisien. Administrasi keuangan desa mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa sebagai data dan informasi untuk mengukur seberapa efektif dan efisien penggunaan dana desa yang dilakukan atas dasar pencapaian tujuan untuk kepentingan masyarakat desa [7]. Administrasi keuangan desa menjadi tugas pemerintah desa dalam mengatur pengelolaan dana desa menjadi modal pembangunan desa baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada pelaksanaan administrasi keuangan, Kepala Desa memiliki kuasa penuh dalam mengatur jalannya pengelolaan dana desa dimana penghasilan, belanja dan pengeluaran desa disusun atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) hingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) peraturan desa yang kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota pada setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 1. Laporan Realisasi APB Desa Winongan Lor Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih/(Kurang) (RP)
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Transfer	1.477.827.000,00	1.468.143.444,00	9.683.556,00
Dana Desa	708.858.000,00	708.858.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	100.349.000,00	100.349.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	348.580.000,00	341.536.444,00	7.043.556,00
Bantuan Keuangan Kab/Kota	320.040.000,00	317.400.000,00	2.640.000,00
Pendapatan Lain-lain	15.650.000,00	1.647.319,11	14.002.680,89
	<b>1.493.477.000,00</b>	<b>1.469.790.763,11</b>	<b>23.686.236,89</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Belanja</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	636.452.498,56	585.760.782,00	50.691.716,56
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	468.333.000,00	459.091.000,00	9.242.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	29.833.845,00	15.570.000,00	14.263.845,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	195.688.800,00	195.190.000,00	498.800,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>161.700.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>			
	<b>1.506.708.143,56</b>	<b>1.417.311.782,00</b>	<b>89.398.361,56</b>
	<b>(13.231.143,66)</b>	<b>52.478.981,11</b>	<b>(65.710.124,67)</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	13.231.143,56	13.231.143,56	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>13.231.143,56</b>	<b>13.231.143,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>65.710.124,67</b>	<b>(65.710.124,67)</b>

Pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor dijalankan oleh Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan Keuangan beserta 1 (satu) staff Kaur Keuangan. Administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporannya dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan seperti Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per Sumber Dana serta Laporan Kompilasi di tingkat Pemerintah Daerah. Dengan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam membuat dan menyusun laporan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan dari kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor. Sekretaris Desa Winongan Lor menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaannya perangkat desa tidak menyelesaikan laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan laporan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dengan tepat waktu dikarenakan kurangnya tingkat kedisiplinan dari perangkat desa yang mengakibatkan tertundanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).” Selain itu juga terdapat keluhan dari masyarakat mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dimana untuk Hasil Laporan Realisasi APBDes yang dilaporkan ke masyarakat melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni melewati akhir bulan Januari sebagai dampak atas tertundanya penyusunan APBDes. Dari permasalahan tersebut perlunya evaluasi guna meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Desa Winongan Lor secara maksimal. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih dalam lagi mengenai kinerja perangkat desa dan pelaksanaan administrasi di Kantor Desa Winongan Lor. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi terhadap suatu hal atau fenomena dengan menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena untuk menghasilkan kalimat yang lebih deskriptif. Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara nyata sesuai dengan fenomena yang telah diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif sangat menitikberatkan pada kesesuaian dan kelengkapan data yang artinya terdapat kesamaan antara data yang diperoleh dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi pada fenomena yang telah diteliti. Oleh karena itu peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor. Kehadiran peneliti disini sangat penting sebagai pelaku utama dalam mendukung jalannya proses penelitian. Subjek penelitian ini adalah perangkat desa yang bertugas dalam bidang administrasi keuangan yaitu Sekretaris Desa. Alasan peneliti memilih Sekretaris Desa sebagai subjek penelitian karena Sekretaris Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh serta memiliki informasi yang rinci terkait dengan keseluruhan kinerja perangkat desa dan pelaksanaan administrasi keuangan desa di Kantor Desa Winongan Lor, Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan selama 5 hari.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui berbagai proses dan hasil kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Peneliti mendatangi Kantor Desa Winongan Lor untuk mengamati secara langsung kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder melalui dokumen dan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor sebagai data tambahan serta bahan pendukung data primer dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi ke Kantor Desa Winongan Lor untuk mengamati secara langsung kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor. Observasi dilakukan selama 5 hari. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor. Wawancara dilakukan selama 5 hari. Peneliti melakukan wawancara dengan mengacu pada instrumen pengumpulan data yang telah disusun dalam bentuk pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang memuat tentang indikator kinerja dari Mitchell yang terdiri atas kualitas kerja, inisiatif, ketepatan waktu, kemampuan, dan komunikasi. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen dan catatan-catatan penting yang tersedia di Kantor Desa Winongan Lor.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis naratif. Analisis naratif merupakan cara atau metode yang berfokus pada narasi yang disampaikan oleh narasumber dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada narasi atas hasil wawancara dengan Sekretaris Desa serta disesuaikan dengan keseluruhan data dari beberapa sumber yang diperoleh seperti artikel, catatan, dan dokumentasi untuk dianalisis dan dideskripsikan menjadi suatu data atau informasi penelitian. Untuk menguji kesahihan data penelitian ini, peneliti mengambil metode triangulasi dengan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilangsungkan dengan mengecek kembali data yang telah didapatkan melalui artikel, catatan, dokumentasi, serta hasil wawancara untuk ditelaah dan dijabarkan oleh peneliti hingga mendapatkan kesimpulan akhir sebagai jawaban atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui penggunaan metode triangulasi sumber, peneliti dapat mendeskripsikan berbagai situasi dan fenomena yang terjadi hingga memperoleh kesimpulan akhir dan gambaran tentang kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

Pelaksanaan administrasi keuangan desa sangat penting untuk mengukur seberapa efektif dan efisien dana desa yang dikelola dan dialokasikan terutama dalam mewujudkan kegiatan pembangunan di Desa Winongan Lor. Berjalannya pelaksanaan administrasi keuangan desa diukur berdasarkan hasil kinerja perangkat desa yang diperlukan sebagai langkah keberhasilan pembangunan di Desa Winongan Lor. Untuk mengukur kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor, peneliti menggunakan lima indikator kinerja pegawai menurut Mitchell. Lima indikator tersebut digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor yang meliputi:

#### 3.2 Kualitas Kerja

Kualitas kerja mengacu pada hasil kinerja perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa. Kualitas kerja didasari pada hasil kinerja perangkat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan untuk menghasilkan berbagai laporan keuangan yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wahyudi selaku Sekretaris Desa Winongan Lor dengan menghasilkan jawaban sebagai berikut:

*“Untuk kualitas kerja dari perangkat yang saya lihat sudah baik ya mas terlebih dengan hadirnya aplikasi Siskeudes yang memudahkan perangkat dalam menyelesaikan laporan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporannya itu semuanya sudah terakomodasi dengan baik.”* (Wawancara 20 Desember 2023).

Pernyataan tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Winongan Lor. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana kualitas kerja yang dihasilkan oleh perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa perangkat desa menggunakan aplikasi Siskeudes untuk mengelola keuangan desa. Dari pengelolaan keuangan desa pada aplikasi tersebut menghasilkan berbagai laporan keuangan desa salah satunya adalah menghasilkan Laporan Realisasi APB Desa. (Observasi 20 Desember 2023).

Gambar 1. Hasil Laporan Realisasi APB Desa Winongan Lor Tahun Anggaran 2023

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut bisa diketahui bahwa kualitas kerja yang dihasilkan oleh perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor bisa dikatakan sudah menghasilkan kualitas kerja yang baik. Baiknya kualitas kerja yang dihasilkan tersebut terlihat dari perangkat desa yang mampu memanfaatkan aplikasi Siskeudes dalam menunjang segala aktivitas pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan sehingga dari pemanfaatan aplikasi tersebut perangkat desa dapat menghasilkan kualitas kerja yang baik.

### 3.3 Inisiatif

Inisiatif mengacu pada sikap inisiatif yang ada pada perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa. Inisiatif didasari pada kemauan yang tinggi dari perangkat desa dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan berbagai laporan keuangan yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Sekretaris Desa Winongan Lor dengan menghasilkan jawaban sebagai berikut:

*“Untuk sikap inisiatif tentunya sudah ada ya mas apalagi saya sebagai Sekretaris Desa disini memegang tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan administrasi keuangan desa dimana saya selalu berkoordinasi melalui penyampaian arahan secara lisan dengan teman-teman perangkat terkait dengan apa saja perencanaan, bagaimana pelaksanaannya, hingga pelaporan akhir. Dari arahan yang sudah saya sampaikan itu perangkat dapat memahami dan lebih berinisiatif untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya.”* (Wawancara 20 Desember 2023).

Pernyataan tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Winongan Lor. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana terbentuknya sikap inisiatif dari perangkat desa dalam menjalankan kegiatan administrasi keuangan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa perangkat desa selalu melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan desa selaras dengan arahan dan prosedur yang ditetapkan. Sekretaris Desa sebagai pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan administrasi keuangan desa juga selalu memonitor situasi dan kondisi serta menginisiasi perangkat desa secara penuh untuk menyelesaikan keseluruhan tugas-tugas administrasi keuangan desa. (Observasi 20 Desember 2023).

Dari hasil observasi dan wawancara di atas bisa diketahui bahwa sikap inisiatif terbentuk dari pemahaman perangkat desa mengenai tugas-tugas administrasi keuangan. Adanya pemahaman tersebut dapat memunculkan sikap inisiatif dan kesadaran dari perangkat desa untuk melakukan pekerjaannya tanpa menunggu perintah terlebih dahulu. Hal tersebut juga tidak terlepas dari besarnya peran dari Sekretaris Desa yang memegang tanggung jawab, mengarahkan, dan menginisiasi secara penuh penyelenggaraan administrasi keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan sehingga dapat terbentuk sikap inisiatif dan kemauan yang tinggi dari perangkat desa.

### 3.4 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengacu pada tingkat ketepatan waktu perangkat desa dalam menyelesaikan kegiatan administrasi keuangan desa. Ketepatan waktu dihasilkan berdasarkan penerapan manajemen waktu yang diatur oleh perangkat desa dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa dengan maksimal dan selesai tepat pada batas waktu yang telah ditentukan sehingga memunculkan sikap kedisiplinan dari perangkat desa khususnya dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Sekretaris Desa Winongan Lor dengan menghasilkan jawaban sebagai berikut:

*“Kalau untuk mengukur ketepatan waktu dari desa sudah ada alur dan mekanisme tahunannya mas mengenai urutan kegiatan administrasi keuangan desa dari Januari hingga Desember. Meskipun begitu pada pelaksanaannya agak terkendala dari perangkat yang seringkali tidak disiplin sehingga jadi mempengaruhi deadline penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang diperlukan untuk penyusunan APBDes selanjutnya.”* (Wawancara 20 Desember 2023).

Pernyataan tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Winongan Lor. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana ketepatan waktu perangkat desa dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi keuangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa perangkat desa masih kurang disiplin ketika melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan desa khususnya dalam menyusun laporan RPJMDes dan RKPDes yang mengakibatkan

tertundanya penyusunan APBDes, Kurangnya kedisiplinan perangkat desa terlihat ketika pada saat jam kerja tidak jarang perangkat desa pergi meninggalkan ruangan kerjanya hanya untuk mengobrol dengan sesama perangkat desa lainnya. (Observasi 20 Desember 2023)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas sudah terlihat bahwa ketepatan waktu dalam penyelenggaraan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor telah diukur dengan mekanisme tahunan yang menjelaskan alur kegiatan administrasi keuangan desa dari bulan Januari hingga bulan Desember. Adanya mekanisme tahunan tersebut tidak serta merta membuat pelaksanaan administrasi keuangan terselenggara selaras dengan agenda yang berlaku. Dalam eksekusinya pada proses perencanaan keuangan Kaur Keuangan tidak dapat membuat Laporan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDes) dan Laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan tepat waktu yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan perangkat desa sehingga menimbulkan tertundanya proses perencanaan keuangan desa sebagai langkah awal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu juga terdapat keluhan dari masyarakat dari sisi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dimana untuk Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 dilaporkan melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni melewati akhir bulan Januari 2023 sebagai dampak atas tertundanya penyusunan APBDes.

### 3.5 Kemampuan

Kemampuan mengacu pada penguasaan yang dimiliki perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa. Kemampuan diukur dari tingkat kemahiran perangkat desa yang dapat mendukung berlangsungnya proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa serta dapat menyelesaikannya dengan maksimal. Dari hal tersebut terlihat kapasitas dan potensi yang ada pada perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa. Peneliti melakukan wawancara dengan Wahyudi selaku Sekretaris Desa Winongan Lor dengan menghasilkan jawaban sebagai berikut:

*“Tentu dari perangkat sudah memiliki kemampuan yang baik ya mas karena seluruh rangkaian dan proses administrasi keuangan disini sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Jadi perangkat sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.”* (Wawancara 20 Desember 2023)

Pernyataan tersebut selaras dengan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Winongan Lor. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan administrasi keuangan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan yang baik khususnya dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes dioperasikan secara penuh oleh Kaur Keuangan sebagai penunjang dalam proses-proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. (Observasi 20 Desember 2023)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa perangkat desa sudah mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan administrasi keuangan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes mengingat seluruh rangkaian dan proses penyelenggaraan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes didapatkan oleh perangkat desa dengan mempelajari fitur-fitur di aplikasi Siskeudes secara mandiri sehingga membuat perangkat desa dapat langsung memahami dan menguasai penggunaan dari aplikasi Siskeudes.

### 3.6 Komunikasi

Komunikasi mengacu pada seberapa baik sinergitas baik antar perangkat desa maupun dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa. Komunikasi terbentuk dari hubungan interaksi dan penyampaian informasi dari perangkat desa mengenai masukan, keluhan, dan penyelesaian tugas-tugas administrasi keuangan terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan desa yang ditujukan agar tercipta kerja sama baik antar perangkat desa maupun dengan masyarakat sehingga pelaksanaan administrasi keuangan desa dapat berjalan dengan maksimal. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Sekretaris Desa Winongan Lor dengan menghasilkan jawaban sebagai berikut:

*“Untuk komunikasi pastinya sudah ada ya mas dari Pemerintah Desa kepada masyarakat di setiap tahunnya kami selalu mengumumkan hasil laporan keuangan desa secara terbuka melalui baliho tepat di halaman Kantor Desa. Selain itu kami juga menyediakan*

*layanan pengaduan masyarakat apabila terdapat aspirasi dan keluhan terkait dengan segala proses pengelolaan keuangan desa.” (Wawancara 20 Desember 2023).*

Pernyataan tersebut selaras dengan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Desa Winongan Lor. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana terbentuknya komunikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa perangkat desa mengkomunikasikan hasil laporan keuangan desa secara transparan kepada masyarakat melalui baliho yang terpampang di halaman depan Kantor Desa Winongan Lor. Selain itu di Kantor Desa Winongan Lor juga memiliki layanan penanganan dan pengaduan masyarakat apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan atau keluhan terkait dengan keseluruhan proses-proses pengelolaan keuangan desa. (Observasi 20 Desember 2023)



Gambar 2. Baliho Laporan Realisasi APB Desa Winongan Lor Tahun Anggaran 2022

Dari hasil observasi dan wawancara di atas bisa diketahui bahwa komunikasi yang dimaksud adalah keterbukaan antara perangkat desa dengan masyarakat terkait dengan layanan atau informasi yang tersedia. Komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik melalui keterbukaan informasi mengenai hasil laporan keuangan desa yang selalu diumumkan seriap tahunnya secara transparan melalui media baliho. Selain itu, Kantor Desa Winongan Lor juga secara terbuka menyediakan layanan berbasis penanganan dan pengaduan masyarakat sebagai wadah dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan keluhannya terkait dengan keseluruhan proses-proses administrasi keuangan desa.

### 3.7 Pembahasan

Pelaksanaan administrasi keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sebagai rujukan dalam menilai seberapa efektif dan efisien penggunaan dana desa yang dialokasikan guna mencapai tujuan desa yaitu untuk meningkatkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan administrasi keuangan desa yang baik perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai kinerja perangkat desa sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan administrasi keuangan serta sebagai bahan evaluasi apakah pemerintah desa sudah melaksanakan proses-proses administrasi keuangan desa dengan efektif dan efisien. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat dari Fatimah & Faddila (2023) bahwa analisis kinerja perangkat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektifitas perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa. Dari hasil analisis tersebut ditemukan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan administrasi keuangan desa yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangan desa. Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. [8]

Dalam mendeskripsikan kinerja perangkat desa tersebut peneliti menggunakan teori indikator kinerja menurut Mitchell yang terdiri atas lima indikator yaitu kualitas kerja, inisiatif, ketepatan waktu, kemampuan, dan komunikasi. Berikut merupakan hasil analisis dari setiap indikator:

### 3.8 Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan hasil dari suatu pekerjaan yang menghasilkan kualitas kerja yang baik atau kualitas kerja yang buruk. Kualitas kerja dihasilkan melalui potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia beserta faktor-faktor lain yang mendukung pekerjaannya sebagai langkah dalam memenuhi sasaran yang diharapkan. Mangkunegara (dalam Armansyah dkk., 2018) menjelaskan bahwa kualitas kerja merupakan tolak ukur atas hasil pekerjaan yang menunjukkan seberapa baik pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Baiknya kualitas kerja yang dihasilkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan didukung dengan

adanya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai sebagai modal utama dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya sehingga dari kemampuan tersebut pegawai dapat menghasilkan kualitas kerja yang baik [9]. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sedarmayanti (dalam Muazansyah, 2018) bahwa kualitas kerja merupakan hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai yang telah memiliki spesifikasi yang mumpuni atas pekerjaannya sehingga dari spesifikasi tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atas penyelesaian suatu pekerjaan guna membangun dan membentuk karakter para pegawai untuk mengetahui apakah tugas-tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta sasaran-sasaran dari suatu pekerjaan sudah dilakukan dengan maksimal. [10]

Dari beberapa pendapat tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan keadaan di Kantor Desa Winongan Lor dimana perangkat desa sudah menghasilkan kualitas kerja yang baik melalui kemampuannya dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes untuk memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dengan menghasilkan laporan Realisasi APBDesa sebagai hasil dari terbentuknya kualitas kerja yang baik selaras dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 seperti yang dikemukakan oleh Hao (Solka dkk., 2023) yang menyatakan bahwa kualitas kerja adalah hasil akhir pelaksanaan tugas atau pekerjaan dengan menghasilkan kualitas kerja yang mumpuni berdasarkan prosedur yang sudah ada dan dipahami oleh pegawai yang memiliki kewajiban penuh atas tugas-tugas atau pekerjaan yang dilimpahkan. [11]. Mengacu pada hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kualitas kerja yang dihasilkan oleh perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor sudah menghasilkan kualitas kerja yang baik. Baiknya kualitas kerja yang dihasilkan tersebut terlihat dari perangkat desa yang mampu memanfaatkan aplikasi Siskeudes dalam menunjang segala aktivitas pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

### 3.9 Inisiatif

Inisiatif didasari pada munculnya sikap kemauan yang tinggi ketika melakukan suatu pekerjaan. Alasan (2016) menyatakan bahwa inisiatif adalah kapasitas pegawai untuk menginisiasi suatu pekerjaan yang dilakukan melalui gagasan ataupun tindakan untuk disampaikan dan dipraktikkan sebagai usaha dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan memecahkan berbagai masalah di dalam pekerjaan tersebut. Munculnya gagasan dan tindakan tersebut didasari atas adanya sikap kemauan dan ketekunan dari pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih optimal [12]. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kusmana (2019) bahwa inisiatif berkaitan dengan sikap kemauan yang tinggi untuk membentuk pola pikir dan tindakan secara nyata atas perencanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.

Mengenai beberapa pendapat tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan keadaan di Kantor Desa Winongan Lor dimana perangkat desa sudah menunjukkan inisiatif yang baik. Inisiatif ditunjukkan dengan sikap kemauan dan ketekunan yang tinggi dari perangkat desa untuk menyelesaikan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Terbentuknya sikap kemauan dan ketekunan yang tinggi tersebut disebabkan karena adanya arahan dan inisiasi dari Sekretaris Desa yang memegang tanggung jawab secara penuh penyelenggaraan administrasi keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan [13]. Seperti yang dikemukakan oleh Yasmeardi dkk., (2019) bahwa inisiatif merupakan bentuk dari sikap kemauan yang tinggi untuk mengeksekusi suatu pekerjaan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang selaras dengan tujuan yang diinginkan. Dengan adanya inisiatif tersebut dapat memperlihatkan kualitas dari perangkat desa yakni munculnya karakter seperti rasa kemauan, ketekunan, kecermatan, tanggung jawab, dan kesenangan dalam melakukan pekerjaannya. [14]. Mengacu pada hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa perangkat desa sudah memiliki sikap inisiatif ketika melakukan pekerjaannya. Sikap inisiatif terbentuk dari pemahaman perangkat desa mengenai tugas-tugas administrasi keuangan. Adanya pemahaman tersebut dapat memunculkan sikap inisiatif dan kesadaran dari perangkat desa untuk melakukan pekerjaannya tanpa menunggu perintah terlebih dahulu. Hal tersebut juga tidak terlepas dari besarnya peran dari Sekretaris Desa yang memegang tanggung jawab, mengarahkan, dan menginisiasi secara penuh pada proses penyelenggaraan administrasi keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan.

### 3.10 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu didasari pada tingkat kedisiplinan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.. Rizaldi dkk., (2022) menyampaikan bahwa ketepatan waktu merupakan batas akhir untuk menuntaskan pekerjaan dari target yang telah ditentukan. Dari setiap pekerjaan yang dilakukan tersebut diupayakan agar bisa dituntaskan sesuai dengan aturan dan tujuan yang

sudah direncanakan dan meminimalisir adanya gangguan dari pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan [15]. Selanjutnya sebagaimana juga yang disampaikan oleh Rahayu (2017) bahwa ketepatan waktu merupakan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah direncanakan untuk memenuhi suatu tujuan yang hendak dicapai. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya [16]. Boediono (dalam Saputra 2017) juga menambahkan bahwa ketepatan waktu merujuk pada pelaksanaan kegiatan yang dituntaskan dalam batas akhir yang sudah ditetapkan. Ketepatan waktu menjadi tolak ukur dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai untuk mengetahui kedisiplinan dari pegawai atas terlaksananya suatu pekerjaan yang sesuai dengan alur pekerjaan yang telah direncanakan.

Mengenai beberapa pendapat tersebut belum menunjukkan kesesuaian dengan keadaan di Kantor Desa Winongan Lor dimana perangkat desa tidak menunjukkan ketepatan waktu sesuai dengan mekanisme tahunan yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa Winongan Lor terutama pada proses perencanaan keuangan untuk pembuatan Laporan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDes) dan Laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 kepada masyarakat dilaporkan melewati batas waktu yang telah ditentukan. [17]. Mengacu pada hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa perangkat desa belum memenuhi standar ketepatan waktu berdasarkan mekanisme tahunan Pemerintah Desa Winongan Lor karena dalam eksekusinya pada proses perencanaan keuangan, Kaur Keuangan tidak menyelesaikan Laporan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDes) dan Laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dengan tepat waktu yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan perangkat desa sehingga berdampak pada tertundanya proses perencanaan keuangan desa sebagai gambaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta juga terdapat keluhan dari masyarakat mengenai proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dimana untuk Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 diumumkan melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni melewati akhir bulan Januari 2023 sebagai dampak atas tertundanya penyusunan APBDesa.

### 3.11 Kemampuan

Kemampuan merupakan keunggulan yang dimiliki oleh individu sebagai penunjang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari keunggulan tersebut terlihat dengan adanya potensi yang dimiliki untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan leluasa tanpa adanya hambatan sedikit pun. Stephen Robbins (dalam Setiadiputra, 2017) menyampaikan bahwa kemampuan adalah potensi yang ada pada seseorang untuk menuntaskan berbagai pekerjaan dalam suatu aturan yang berlaku. Kemampuan tersebut bisa melalui kemampuan fisik maupun kemampuan intelektual. Kemampuan fisik berasal dari kondisi pada diri seseorang yang ditunjukkan pada gerakan-gerakan tubuh menjadi suatu aktivitas yang produktif. Sedangkan kemampuan intelektual berasal dari akal dan pikiran seseorang yang dikeluarkan dalam bentuk ide, gagasan, dan pengetahuan untuk memudahkan tindakan seseorang serta mengatasi permasalahannya [18]. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sigit (dalam Harefa & Telaumbanua 2022) bahwa kemampuan merupakan potensi yang dimiliki dalam diri individu untuk menjalankan suatu pekerjaan menggunakan fisik, mental, maupun pikiran yang diperoleh dari lahir, belajar, dan pengalaman.

Mengenai beberapa pendapat tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan keadaan di Kantor Desa Winongan Lor dimana perangkat desa sudah menunjukkan kemampuan yang baik. Kemampuan yang ada pada perangkat desa adalah kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes yang digunakan dalam menjalankan secara penuh proses penyelenggaraan administrasi keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perangkat desa sudah memiliki kemampuan yang mumpuni baik dari kemampuan fisik maupun kemampuan intelektual. Kemampuan fisik ditunjukkan melalui kapasitas perangkat desa dalam membuat laporan Realisasi APBDes serta kemampuan intelektual yang ditunjukkan melalui pengetahuan dari hasil pembelajaran mengenai fitur-fitur di aplikasi Siskeudes sehingga perangkat dapat memahami penggunaan dari aplikasi tersebut [19]. Seperti yang dijelaskan oleh Hanibe dkk., (2018) bahwa kemampuan atau keterampilan mengacu pada penggunaan berbagai potensi yang ada dalam diri pegawai untuk membentuk kepandaian, kecakapan, dan kecekatan untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan harapan yang diinginkan. [20]. Mengacu pada hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa perangkat desa sudah memiliki kemampuan yang baik ketika mengerjakan tugas-tugas administrasi keuangan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena seluruh rangkaian dan proses penyelenggaraan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Kemampuan

dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes didapatkan oleh perangkat desa dengan mempelajari fitur-fitur di aplikasi tersebut secara mandiri sehingga membuat perangkat desa dapat langsung memahami dan menguasai penggunaan dari aplikasi Siskeudes.

### 3.12 Komunikasi

Komunikasi didasari pada hubungan interaksi melalui penyampaian dan masukan informasi dari beberapa orang atau lebih. Efendy (dalam Fitriyah & Panuju, 2022) menjelaskan bahwa komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan antara komunikator dan penerima menggunakan media perantara dengan tujuan agar memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan baik. Dalam hal ini komunikasi dilakukan sebagai bentuk keterikatan sosial yang dapat menghubungkan dua orang atau lebih untuk saling memberi gagasan dan masukan dalam rangka menciptakan sinergitas khususnya dalam melakukan suatu pekerjaan [21]. Seperti yang disampaikan oleh Everett M. Rogers (dalam Simamora, 2018) bahwa komunikasi adalah proses penyampaian ide dan gagasan dari satu pihak atau lebih dengan tujuan untuk menyebarkan argumen sekaligus mempengaruhi pola perilaku penerima untuk saling sependapat dengan penerima yang lain.

Mengenai beberapa pendapat tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan keadaan di Kantor Desa Winongan lor dimana perangkat desa sudah menunjukkan komunikasi yang baik khususnya dengan masyarakat. Komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik melalui keterbukaan informasi mengenai hasil laporan keuangan desa yang selalu diumumkan seriap tahunnya secara transparan melalui baliho. Selain itu, Kantor Desa Winongan Lor secara terbuka juga menyediakan layanan berbasis penanganan dan pengaduan masyarakat sebagai wadah dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keluhannya terkait dengan keseluruhan proses-proses administrasi keuangan desa. [22]. Mengacu pada hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa komunikasi antar perangkat desa khususnya dengan masyarakat desa sudah terjalin dengan baik. Komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat terbentuk dalam keterbukaan layanan dan informasi yang disediakan langsung di Kantor Desa Winongan Lor.

## 4. KESIMPULAN

Mengenai hasil kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor dalam beberapa indikator seperti kualitas kerja, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi sudah menunjukkan hasil yang maksimal, namun untuk indikator ketepatan waktu masih belum menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut tentu menjadi tugas bagi Pemerintah Desa untuk menyusun strategi sebagai langkah evaluasi terutama pada peningkatan kedisiplinan perangkat desa dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dilaporkan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan dalam usaha meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan di Kantor Desa Winongan Lor.

## REFERENCES

- [1] M. & C. Muliadin, "Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, pp. 7-13, 2017.
- [2] H. N. Soetjpto, Analisis Kinerja Perangkat Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi (D. E. Susilo, Ed.), CV. Mitra Sumber Rejeki, 2016.
- [3] Widiati, "Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar," *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 6, no. 2, pp. 50-59, 2021.
- [4] M. H. & M. W. Setyobakti, "Analisis Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Lumajang," *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, vol. 8, no. 2, pp. 42-50, 2018.
- [5] I. E. & M. F. Setyawati, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kantor Desa Cinunuk," *Neo Politea*, vol. 3, no. 1, pp. 36-48, 2022.
- [6] W. D. & A. R. Onsardi, "Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, vol. 2, no. 2, pp. 169-176, 2019.

- [7] A. Fajri, "Analisis Tingkat Efektivitas Kinerja Sekretaris Desa Dalam Mengelola Administrasi Keuangan di Kantor Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya," *Jurnal Mentari Publika*, vol. 1, no. 1, pp. 1-8, 2020.
- [8] E. & F. S. P. Fatimah, "Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Melakukan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Desa Pinayungan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 5, pp. 946-953, 2023.
- [9] A. A. I. & R. N. P. E. Armansyah, "Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu," *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, vol. 4, no. 3, pp. 235-244, 2018.
- [10] I. Muazansyah, "Pengaruh Kemampuan Kerja (Work Ability) dan Kualitas Kerja (Work Quality) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, vol. 21, no. 1, pp. 49-61, 2018.
- [11] P. U. N. Y. A. & N. R. Solka, "Pengaruh Kemampuan Kerja (Work Ability) Dan Kualitas Kerja (Work Quality) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Sosial Kabupaten Solok.," *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 3, no. 1, pp. 110-121, 2023.
- [12] A. Alasan, "Kemampuan Pemerintah Desa Dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan," *Otonomi: Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 9, no. 17, pp. 2-18, 2016.
- [13] Kusmana, "Pengaruh Semangat Kerja Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu," *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Bussines Review*, vol. 10, no. 3, pp. 351-359, 2019.
- [14] F. R. D. & F. N. Yasmeardi, "Pengaruh Inisiatif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Koto Tangah Kota Padang," *Jurnal Public Administration, Bussiness and Rural Development Planning*, vol. 1, no. 2, pp. 46-55, 2019.
- [15] K. D. & A. D. N. Rizaldi, "Efektifitas Kinerja Pada Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no. 10, pp. 359-361, 2022.
- [16] K. W. Rahayu, "Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Ekonomia*, pp. 1-6, 2017.
- [17] R. D. Saputra, "Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda," *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 5, no. 3, p. 6342-6355, 2017.
- [18] R. Y. P. Setiadiputra, "Urgensi Program Pengembangan Kompetensi SDM Secara Berkesinambungan di Lingkungan Instansi Pemerintah," *Jurnal Sawala*, vol. 5, no. 1, pp. 16-22, 2017.
- [19] P. & T. E. Harefa, "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara," *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 2299-2309, 2022.
- [20] A. M. S. S. & K. J. Hanibe, "Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja," *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 1, pp. 1-9, 2018.
- [21] & P. R. Fitriyah, "Komunikasi Pembangunan Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pasuruan Resik," *JSL: Journal Socia Leoica*, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2022.
- [22] F. N. Simamora, "Pengaruh Komunikasi Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Camat Sibolga Sambas Kota Sibolga," *Jurnal Warta: Edisi 55*, pp. 1-21, 2018.